



IMPLEMENTASI PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMA NEGRI 1 BAKAUHENI LAMPUNG SELATAN

Hadi Ismanto¹, Nurul Hidayati Murtafi'ah², Sri Lestari³

Institut Agama Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email : hadibakau@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to determine the implementation of strategic planning in improving the quality of educators. To answer the research problem, this type of field research is used. Data collection techniques in this study include: observation, interviews, and documentation. The data were analyzed, namely data reduction, data presentation, and data verification or drawing conclusions. Then tested the validity of the data by using triangulation of sources and research techniques. The conclusion from the results of this study is that the implementation of strategic planning at SMA Negeri 1 Bakauheni is good, including the implementation of strategic planning at SMA Negeri 1 Bakauheni. In the strategic planning step, the head of the Sekcool takes several steps, namely strategic planning, strategic planning, and strategic planning evaluation. The head of the Sekolah carried out several planning steps, namely forming a special team as the initiator of the strategic planning from various qualified resources, dividing groups with their respective tasks; identify and review various laws and regulations and sekcool policies regarding improving the quality of educators; creating the vision, mission, and values of the ma drasa; analyze by identifying the strengths, weaknesses, strengths, and threats contained in SMA Negeri 1 Bakauheni according to the actual conditions in the ma drasa. This activity is assisted by a team formed; identify the strategic issues at hand. At this step strategic issues have not been analyzed according to the level of urgency; formulating strategies to ma nage issues by formulating planned programs and activities to address strategic issues; as well as reviewing and adopting the strategies set out in the strategic plan.*

Keywords: *Committee, School-Based Management*

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi perencanaan strategis dalam meningkatkan mutu pendidik. Untuk menjawab masalah penelitian Maka digunakan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dan teknik penelitian. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu implementasi perencanaan strategis di SMA Negeri 1 Bakauheni sudah bagus meliputi Implementasi perencanaan strategis di SMA Negeri 1 Bakauheni Pada langkah perencanaan renstra, kepala Sekolah melakukan beberapa langkah yaitu perencanaan renstra, pelaksanaan resntra, dan evaluasi renstra. Kepala Sekolah melakukan beberapa langkah perencanaan yaitu membentuk tim khusus sebagai pemrakarsa pembuatan renstra dari berbagai sumber daya yang mumpuni, membagi kelompok dengan tugas Masing-masing; mengidentifikasi dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekolah tentang peningkatan mutu pendidik; menciptakan visi, misi, dan nilai-nilai sekolah ; menganalisis dengan mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, kekuatan, dan ancaman yang terdapat di SMA Negeri 1 Bakauheni sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang ada di Sekolah. Kegiatan ini dibantu oleh tim yang dibentuk; mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi. Pada langkah ini isu strategis belum dianalisis sesuai dengan tingkat urgen; merumuskan strategi untuk mengelola isu dengan melakukan

perumusan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan untuk menangani isu strategis; serta mereview dan mengadopsi strategi yang telah ditetapkan dalam renstra.

Kata Kunci: Komite, Manajemen Berbasis Sekolah

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian dalam beberapa tahun disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah era pemerintah yang sentralisasi telah berakhir. Sistem pemerintahan telah berubah menjadi era pemerintah yang menganut asas desentralisasi atau otonomi. Hampir semua urusan pemerintah telah diotonomikan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota.¹

Hal ini diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah, dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui otonomi daerah, hubungan Sekolah dengan masyarakat secara education dan cultural khususnya orang tua murid dan masyarakat sekitar Sekolah juga perlu direformasi sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada Sekolah. Salah satunya adalah dengan membentuk Komite Sekolah atau Majelis Sekolah untuk memberdayakan orang tua murid dalam pendidikan.

Keberadaan komite Sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite Sekolah ditingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat Sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite Sekolah.²

Keberadaan komite Sekolah merupakan bagian dari pewujudan manajemen berbasis Sekolah yang melibatkan berbagai komponen, termasuk masyarakat dan wali murid. Peran komite Sekolah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu layanan pendidikan adalah sebagai badan *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

Salah satu tantangan dunia pendidikan saat ini adalah upaya peningkatan

¹ Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Bumi aksara, 2014), h. 4

² Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 92

mutu itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja dengan kata lain peningkatan mutu Sekolah itu tidak ditentukan oleh factor tunggal tetapi ditentukan oleh multi factor, salah satu factor yang menentukan peningkatan keberhasilan mutu Sekolah adalah perhatian, kepedulian dan kerjasama bersama antara Sekolah dengan masyarakat, saat ini berdasarkan undang- undang No 20 tahun 2003 partisipasi masyarakat atau perhatian masyarakat yang diwujudkan dalam peran dan fungsinya didunia pendidikan telah dirumuskan didalam undang-undang No 20 tahun 2003 dalam membentuk komite Sekolah /Sekolah sebagaimana disebutkan didalam peran dan fungsi komite Sekolah tersebut.

Sebagai institusi pendidikan peran komite sangat penting untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas dan proses pembelajaran di Sekolah . Dalam upaya memperbaiki dan menjaga kualitas dan proses pembelajaran Sekolah dalam pengelolaan Sekolah agar menjadi efektif dan efisien kepala Sekolah harus menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).³

Sebagai organisasi Sekolah , Sekolah berfungsi membina SDM yang kreatif dan inovatif bukan saja peserta didiknya, tetapi juga tenaga pendidiknya. Organisasi Sekolah harus menjadi model organisasi yang tepat untuk semua tingkatan, dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Peningkatan mutu pendidikan yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) harus dibarengi pula oleh peningkatan mutu dan menerapkan manajemen yang berorientasi pada mutu dan perbaikan yang berkesinambungan. Kegagalan dalam memperbaiki mutu pendidikan akibat manajemen yang lemah akan menimbulkan kegagalan generasi baik dalam makro maupun dimensi mikro. Oleh karena itu, manajemen Sekolah harus mengembangkan kreatifitas, inovasi, modernisasi, dan terfokus pada pelanggan pendidikan. ⁴

Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah, telah memberikan harapan bagi kelangsungan dan terkendalinya kualitas pendidikan Indonesia semasa krisis. Akan tetapi, karena pengelolaannya yang terlalu kaku dan sentralistik, program itu pun tidak banyak memberikan dampak positif angka partisipasi pendidikan nasional maupun kualitas pendidikan tetap menurun, diduga hal tersebut berat kaitannya dengan masalah manajemen.

Dalam kaitan ini, munculah salah satu pemikiran kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada Sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini dalam perjalanannya disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)), yang telah berhasil mengangkat komisi dan memecahkan berbagai masalah pendidikan beberapa negara maju, seperti Australia dan Amerika.⁵

Tujuan umum Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan Sekolah melalui pemberian kewenangan

³ Barnawi dan Arifin, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar : RuzzMedia, 2017),h.11

⁴ Tilaar, kekuasaan dan pendidikan : *Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019),h. 309.

⁵ Nur Hidayah Maya Ayu K, Andi Warisno, "Fungsi Manajerial Kepala MAdrasah Dalam Menciptakan MAdrasah Efektif Di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Muhtadin Kecamatan JAti Agung Kabupten Lampung," *Jurnal MuhtadiinMuhtadiin* 7 No. 2, no. Juli-Desember 2021 (2021): 29-45.

kepada Sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada Sekolah untuk mengelola sumber daya Sekolah dan mendorong partisipasi warga Sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.⁶

Pada tataran ini, Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar pada Sekolah, memberikan fleksibilitas pada Sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga Sekolah yaitu guru, siswa, kepala Sekolah, karyawan dan masyarakat dan meningkatkan mutu Sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, seluruh komponen Sekolah bekerja sama dengan stakeholder Sekolah bersama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah dengan standar dari pemerintah. Dengan penerapan MBS, masyarakat peduli pendidikan terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan program pendidikan.⁷

Artinya, dalam hal ini, bukan hanya instansi bersifat komersial saja yang dituntut untuk berkompetensi, melainkan lembaga pendidikan juga dituntut untuk bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain untuk menawarkan jasa yang ada kesesuaian dan keserasian dengan kebutuhan masyarakat sebagai *user education*. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus mempunyai sistem manajemen pendidikan yang baik dan mapan untuk menyongsong era kompetensi. Artinya, jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan perlu dikenali. Untuk itu, diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem di sini merupakan suatu mekanik dalam suatu anatomi pendidikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸

Sumber data penelitian ini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh, apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ada beberapa teknik yang

⁶ Andi Warisno and Nur Hidayah, “Investigating Principals’ Leadership to Develop Teachers’ Professionalism at Madrasah,” *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 603–616.

⁷ Nurul Hidayati Murtafiah, “Analisis Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional (Studi Kasus : IAI An-Nur Lampung)” (2021): 789–812.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h.15.

digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, antara lain yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Sekolah maupun lembaga pemerintah

lainnya. Komite Sekolah dan Sekolah memiliki kemandirian masing-masing, akan tetapi tetap menjadi mitra yang harus bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis Sekolah (MBS). Karena tanpa manajemen yang baik tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan kewenangan penuh (otonomi) kepada Sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan. Konsep MBS juga merubah sistem pembelanjaan anggaran semaksimal mungkin menjadi pemakaian anggaran seefisien mungkin. Sehingga komite Sekolah diharapkan mampu bekerjasama dengan kepala Sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas Sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis Sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan dan akuntabel

Pembentukan komite Sekolah diharapkan dapat memacu usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, selaras dengan konsepsi berbasis masyarakat. Yang mana kini konsep manajemen berbasis Sekolah bukan hanya sebagai wacana saja akan tetapi sudah diterapkan di Negara Indonesia.

Secara umum, manajemen berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada Sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwasan kepada Sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung dari warga Sekolah (guru, siswa, kepala Sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan pengusaha dsb). Untuk meningkatkan mutu Sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan otonomi yang lebih besar, maka Sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola Sekolahnya, sehingga lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, Sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan fleksibilitasnya/ keluwesannya, Sekolah lebih atraktif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya Sekolah secara optimal. Demikian juga dengan partisipasi/ keterlibatan warga Sekolah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan Sekolah, maka rasa memiliki mereka terhadap Sekolah dapat ditingkatkan

Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggungjawab akan meningkatkan dedikasi warga Sekolah. Inilah esensi warga Sekolah dan masyarakat dalam pendidikan dan pembangunan Sekolah harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan bersama. Baik dalam peningkatan otonomi Sekolah, fleksibilitas sumber daya Sekolah maupun partisipasi warga Sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Sekolah tersebut, kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu Sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data /informasi hasil penelitian di lapangan bahwa komite Sekolah telah melaksanakan peranannya dalam meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik Sekolah, Kegiatan akademik siswa terkait prestasi dan pengembangan bakat siswa, kejuaraan/ olimpiade hingga kerjasamanya dengan sister school di luar negeri dengan tujuan agar mampu mewujudkan Misi dan Visi dari SMA Negeri 1 Bakauheni. Tidak hanya kompetensi dari siswa saja yang dikembangkan oleh SMA Negeri 1 Bakauheni, melainkan kompetensi guru yang mengajar juga menjadi perhatian, mengingat SMA Negeri 1 Bakauheni merupakan Sekolah RSBI dengan menuntut intelektualitas yang tinggi menjadikan guru sebagai partner siswa harus meningkatkan kemampuan akademisnya. Hal ini dapat dilihat dari lulusan guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Bakauheni memiliki latar pendidikan beragam dari mulai S2 maupun S1. Selain itu guru-guru di SMA Negeri 1 Bakauheni juga dihimbau agar meningkatkan kompetensinya dalam bahasa inggris, baik melalui workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang mampu menunjang kompetensi guru yang bersangkutan. Untuk Hal-hal yang bersifat nonakademik ini meliputi pembangunan sarana-prasarana yang diharapkan mampu menunjang pendidikan yang bersifat akademis. Misalnya Adanya gedung-gedung baru seperti laboratorium komputer dan juga lapangan basket yang merupakan kerjasama Sekolah dengan pihak komite. Adanya gedung tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pendidikan akademisnya.

Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) sudah cukup baik dalam menjalankan perannya, mulai pemberian masukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan Sekolah. Komite Sekolah juga memberikan pertimbangan kepada Sekolah terkait dengan tenaga kependidikan yang diperbantukan untuk Sekolah. Dalam peningkatan mutu guru, komite Sekolah juga memberikan pertimbangan untuk guru-guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

Komite Sekolah dalam melakukan peran sebagai badan pendukung (*Supporting Agency*) melakukan langkah-langkah yang cukup baik terutama terkait dengan sarana dan prasarana yang diperbantukan untuk Sekolah. Dengan adanya sarana-prasarana yang menunjang pendidikan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan seperti pengadaan gedung baru Laboratorium komputer dan juga lapangan basket di Sekolah.

Komite Sekolah dalam melakukan peran pengontrol (*controlling agency*). Hingga saat ini selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat maupun dana dari masyarakat yang mengalir ke Sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu pemantauan terkait dengan hasil belajar siswa juga dilakukan oleh komite Sekolah. Akan tetapi untuk pemantauan proses KBM di dalam kelas belum pernah dilakukan oleh komite Sekolah di SMA Negeri 1 Bakauheni karena Komite tidak bersinggungan langsung dengan guru yang mengajar akan tetapi pada kepala Sekolah.

Peran komite Sekolah sebagai mediator atau penghubung dalam pengelolaan sumberdaya pendidikan masih kurang berperan. Sumber dana yang diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua siswa dengan cara menarik uang komite Sekolah atau iuran rutin orang tua siswa secara bulanan, serta iuran pembangunan/ pengembangan Sekolah pada awal diterima di Sekolah. Peran Komite Sekolah dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat, supaya aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Bakauheni belum berjalan secara maksimal. Sebagian besar dari orang tua siswa belum memahami tugas-tugas dari komite Sekolah. Masyarakat hanya dapat memberi dukungan secara materi dan belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril kepada Sekolah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hingga saat ini masih ada sedikit masalah terkait peran komite Sekolah dari pandangan sebagian orang tua siswa (masyarakat). Mereka menilai belum ada keseragaman antara pihak komite Sekolah dengan orang tua siswa, berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa, masih beranggapan bahwa peran dari komite Sekolah masih berkuat pada pengadaan dana untuk Sekolah dalam rangka pembangunan fisik Sekolah. Bahkan pihak komite Sekolah lebih bersifat "pro" pada pihak Sekolah, sehingga peran komite sebagai mediator kurang dapat tersalurkan dengan baik. Sebaiknya pihak komite Sekolah itu sendiri bersikap "*balance*" dalam artian seimbang atau tidak berat sebelah antara lebih pro kepada pihak Sekolah ataupun pada orang tua siswa. Akan tetapi harus mampu merangkul keduanya demi meningkatkan mutu pendidikan Sekolah mulai dari merancang program-program Sekolah hingga anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan program-program yang sudah direncanakan.

Meskipun demikian hasil dari kinerja komite Sekolah di SMA Negeri 1 Bakauheni sudah dapat dilihat dan di rasakan, fasilitas-fasilitas Sekolah sangat lengkap dan nyaman membuat siswa lebih menikmati kegiatan akademis maupun kegiatan non akademis. Mulai dari kegiatan belajar, olimpiade dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai penyaluran bakat siswa juga diupayakan dengan baik oleh komite Sekolah. Demi terciptanya Visi dan Misi Sekolah yang mana lebih jauh lagi mampu memberikan kepercayaan pada masyarakat luas bahwa SMA Negeri 1 Bakauheni memang memiliki predikat Sekolah yang baik. Hal ini dapat kita lihat dari lulusan SMA Negeri 1 Bakauheni yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri dan juga ada yang melanjutkan studi ke luar negeri. Semua itu berjalan bukan saja kinerja dari Sekolah sendiri akan tetapi juga merupakan peran dari komite Sekolah yang berkerja secara ikhlas untuk menjadi partner Sekolah demi demi meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam lapangan terdapat kenyataan bahwa masyarakat lebih mengenal komite Sekolah berperan seperti BP3 di masa lalu yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan pendidikan untuk membiayai program fisik Sekolah dan kurang menyentuh program non fisik. Di lain hal terkait dengan kerjasama antar komite Sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri belum pernah

dilaksanakan karena dana yang diberikan hingga saat ini hanya diperoleh dari iuran komite Sekolah dan bantuan dari orang tua siswa.

Melalui wadah komite Sekolah masyarakat semakin menyadari dan memahami tentang proses penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan di Sekolah untuk berkomitmen demi mewujudkan cita-cita bersama menjadi Sekolah yang bermutu dan bahkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional). Tugas Komite Sekolah tidak hanya sebagai penggalang dana seperti yang sering dibicarakan oleh masyarakat awam, tetapi berperan sebagai mediator antara pihak Sekolah dengan masyarakat (orang tua siswa) dalam kegiatan Sekolah. Komite Sekolah juga mengadakan pertemuan-pertemuan formal meskipun tidak secara rutin dilaksanakan. Komite Sekolah juga pernah diundang kepala Sekolah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan rencana pengembangan Sekolah (RPS). Program-program yang dibahas dan dikembangkan ini menunjukkan kecenderungan atau terfokus pada perbaikan fisik Sekolah. Walaupun tidak semua komite Sekolah mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan perlu menjadi alasan utama seseorang mengabdikan dirinya di sebuah organisasi komite Sekolah.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Disamping itu, komite Sekolah juga harus melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai peran keterlibatan komite Sekolah melalui sosialisasi itulah diharapkan masyarakat mengerti, mengetahui dan memahami sekaligus dapat memantau kinerja komite Sekolah. Agar peran komite Sekolah dapat berjalan optimal dan “tidak berat sebelah”, maka langkah /upaya sosialisasi dan komunikasi dengan orang tua siswa harus selalu dibina dan dikembangkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Seluruh rangkaian proses penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*Advisory agency*) Peran ini diwujudkan dalam bentuk memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh Sekolah, misalnya dalam hal perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, seperti perbaikan rang kelas, pengadaan alat peraga, pembangunan laboratorium, pembangunan ruang kelas. Selain itu, komite Sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat diperbantukan bagi pengembangan Sekolah.

Peran komite Sekolah sebagai badan pendukung (*Supporting agency*) Peran ini diwujudkan dalam bentuk memberikandukungan (*supporting*

agency) dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Bakauheni berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.

Peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol (*Controlling agency*) Peran ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan kontrol (*controlling agency*) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Sekolah, di samping alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program di Sekolah. Komite Sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di Sekolah yang didasarkan pada perkembangan prestasi secara periodik.

Peran komite Sekolah sebagai Mediator Peran tersebut diwujudkan dengan menjadi mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak Sekolah serta turut serta memasyarakatkan kebijakan Sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnawi, dan Arifin. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar : Ruzz Media, 2017), h.11
- Maya Ayu K, Andi Warisno, Nur Hidayah. "Fungsi Manajerial Kepala Madrasah Dalam Menciptakan Madrasah Efektif Di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Muhtadin Kecamatan Jati Agung Kabupten Lampung." *Jurnal Mubtadiin* 7 No. 2, no. Juli-Desember 2021 (2021): 29-45.
- Murtafiah, Nurul Hidayati. "Analisis Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional (Studi Kasus : IAI An-Nur Lampung)" (2021): 789-812.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h.15.
- Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Bumi aksara, 2014), h. 4
- Tilaar. *kekuasaan dan pendidikan : Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019), h. 309.
- Uno, Hamzah B. *Profesi Kependidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 92
- Warisno, Andi, and Nur Hidayah. "Investigating Principals' Leadership to Develop Teachers' Professionalism at Madrasah." *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 603-616.

